

UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ABRASI DI GAMPONG KEUDAI PALAK KERAMBIL SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Musfiza Hasrian¹⁾, Sabirin²⁾, Wirda Amalia³⁾

^{1,2,3} Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 200405051@student.ar-raniry.ac.id, sabirin@ar-raniry.ac.id, wirda.suzli@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Abrasi yang terjadi di Gampong Keudai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan pesisir, yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam menangani abrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi keefektifan upaya mitigasi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kajian dokumen dari lembaga pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abrasi disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan kegiatan manusia, sedangkan upaya pemerintah masih terbatas pada pembagian geobag serta perencanaan pembangunan breakwater yang belum diwujudkan. Partisipasi masyarakat bersifat adaptif, dengan menggunakan karung berisi tanah sebagai penghalang sementara terhadap gelombang laut. Secara keseluruhan, penanganan abrasi di wilayah ini memerlukan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan terintegrasi serta pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan lokal untuk mencapai mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Abrasi Pantai; Keterlibatan Pemerintah; Peran Masyarakat; Mitigasi Bencana.

ABSTRACT

Coastal abrasion occurring in Gampong Keudai Palak Kerambil, Susoh Subdistrict, Southwest Aceh Regency, has caused severe environmental damage to the coastal area, resulting in significant negative impacts on the social and economic life of the local community. This study aims to analyze government efforts and community participation in addressing the abrasion problem, as well as to identify the factors hindering the effectiveness of mitigation measures. Using a qualitative method with a historical and descriptive approach, data were collected through field observations, interviews, and document analysis from relevant government agencies. The findings indicate that abrasion is caused by a combination of natural factors and human activities, while government efforts have so far been limited to the distribution of geobags and plans for the construction of breakwaters, which have not yet been realized. Community participation is characterized as adaptive, primarily through the use of soil-filled sacks as temporary barriers against sea waves. Overall, addressing the abrasion issue in this area requires sustained collaboration between the government and the community through integrated policies and local empowerment-based approaches to achieve effective and sustainable mitigation.

Keywords: Coastal Abrasion; Government Involvement; Community; Disaster Mitigation

PENDAHULUAN

Abrasi adalah proses pelepasan energi balik gelombang laut ke arah daratan, yang menghantam tepi pantai, kemudian membawa serta material tanah sepanjang lereng pantai, dan akhirnya mengendapkannya di laut. Semakin kuat gelombang, semakin besar abrasi yang terjadi, sehingga semakin banyak material tanah yang terbawa. Abrasi didefinisikan sebagai proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak (Noya & Noya, 2023).

Seiring waktu, garis pantai terus berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor alami dan faktor non-alami yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, risiko di daerah pesisir semakin meningkat karena tekanan dari aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Dimaya & Wijayanti, 2025).

Abrasi merupakan masalah utama yang mempengaruhi kondisi daerah tersebut, yang dapat mengubah garis pantai hingga menyebabkan pergeseran ke belakang, memengaruhi lokasi sawah di tepi pantai, serta merusak bangunan yang terus-menerus terpapar udara terbuka, baik yang digunakan sebagai tempat wisata maupun rumah penduduk (Israil et al., 2023).

Dampak abrasi tidak hanya terbatas pada perubahan fisik garis pantai, tetapi juga meliputi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, rusaknya infrastruktur, serta gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Salah satu wilayah yang sangat terpengaruh oleh abrasi adalah Gampong Keudai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pada tahun 2019 tercatat sekitar 18 rumah warga di wilayah ini rusak karena abrasi. Hingga tahun 2023, abrasi terus berlanjut dan semakin mengancam kelangsungan daerah pesisir. Sampai pertengahan tahun 2025, abrasi pesisir di Gampong Keudai Palak Kerambil masih menjadi ancaman lingkungan yang belum ditangani secara efektif.

Meskipun pembangunan struktur pengaman pantai (breakwater) telah dimasukkan ke dalam Program Nasional (PROGNAS) oleh BPBD Aceh Barat Daya, pelaksanaan fisiknya belum dilakukan. Kendala utamanya berada pada tahap

pra-konstruksi, di mana proses tender proyek baru mencapai tahap administratif. Kondisi ini secara langsung meningkatkan kerentanan permukiman pesisir terhadap erosi dan risiko bencana selama periode pasang laut tinggi. Percepatan realisasi proyek fisik sangat penting untuk mitigasi risiko yang berkelanjutan (Muthmainnah et al., 2022).

Abrasi yang terjadi hampir setiap tahun menyebabkan penyusutan lahan daratan, kerusakan rumah penduduk, infrastruktur desa, dan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi dan pendidikan.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi, seperti pembangunan tanggul darurat dan program perlindungan pantai. Salah satu regulasi yang menjadi dasar kebijakan adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2012, yang mengatur tentang organisasi dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 1 Ayat 28 qanun tersebut menyatakan bahwa penanggulangan bencana meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan infrastruktur.

Namun, abrasi tetap menjadi ancaman nyata yang belum ditangani secara menyeluruh, bahkan berdampak pada sektor pariwisata lokal yang merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menangani abrasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk abrasi yang terjadi, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi, serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan mitigasi yang efektif di Gampong Keudai Palak Kerambil. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan strategi mitigasi abrasi yang berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus historis, di mana penelitian ini mengumpulkan informasi dengan mengamati fakta-fakta yang sedang berlangsung atau peristiwa yang telah

terjadi sebelumnya, kemudian dijelaskan secara deskriptif (Sularso et al., 2021). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dinamika sosial, kebijakan pemerintah, serta inisiatif masyarakat dalam menangani abrasi di Gampong Keudai Palak Kerambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gampong Keudai Palak Kerambil adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh barat Daya. Desa Keudai Palak Kerambil memiliki salah satu pantai yang mengalami abrasi cukup parah. Secara astronomis Desa Keudai Palak Kerambil ini terletak Desa Palak Kerambil terletak pada posisi sekitar 3°42' hingga 3°45' Lintang Utara (LU) dan 96°48' hingga 96°50' Bujur Timur (BT).

Abrasi yang terjadi di Gampong Keudai Palak Kerambil telah berlangsung secara berulang dari tahun ke tahun. Fenomena ini mengakibatkan penyusutan daratan pesisir yang signifikan serta mengancam permukiman masyarakat setempat. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti eksploitasi pasir pantai dan berkurangnya vegetasi alami turut mempercepat proses abrasi tersebut (Marhamah et al., 2025).

Dampak abrasi sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti hilangnya lahan untuk pemukiman, kerusakan infrastruktur, serta berkurangnya sumber daya alam pesisir yang penting untuk mendukung kehidupan penduduk setempat. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat meliputi pemasangan pemecah ombak serta penanaman kembali hutan bakau. Meskipun demikian, abrasi tetap menjadi ancaman yang memerlukan solusi yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan serta masyarakat yang terpengaruh (Permatasari, 2021).

Di gampong desa keudai palak kerambil abrasi mulai terjadi di akhir tahun 2016 hampir memasuki tahun 2017 hingga tahun 2023 dan memungkinkan akan terjadi lagi abrasi hingga sekarang dikarenakan pembangunan batu pemecah ombak belum terealisasi hingga saat ini.

Di tengah keterbatasan dan belum adanya langkah nyata dari pemerintah, masyarakat tetap menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong yang

tinggi. Mereka secara swadaya membuat tanggul darurat dari karung berisi pasir serta menanam pohon cemara di sepanjang pesisir sebagai penahan alami ombak. Upaya sederhana namun bermakna ini mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan tanggung jawab masyarakat Gampong Keudai Palak Kerambil dalam menjaga lingkungan serta mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dari ancaman abrasi.

Perkembangan Kondisi Tahun 2024–2025 dan Realitas Terkini di Lapangan Hingga pertengahan tahun 2025 kondisi abrasi di Gampong Keudai Palak Kerambil masih menjadi masalah lingkungan yang mendesak dan belum tertangani secara tuntas. Meskipun sebelumnya pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh Barat Daya (BPBD) telah memasukkan pembangunan breakwater dalam program nasional (PROGNAS), realisasi di lapangan masih belum terlihat.

Proses lelang pembangunan baru memasuki tahap administrasi, sehingga pengerjaan fisik belum dimulai. Hal ini menyebabkan warga yang tinggal di sekitar pesisir harus terus berhadapan dengan risiko abrasi setiap kali musim pasang tiba.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Juli 2025, Kepala Desa Keudai Palak Kerambil menyampaikan bahwa pemerintah desa telah kembali mengajukan proposal bantuan ke dinas terkait, namun keterbatasan anggaran dan birokrasi memperlambat pelaksanaan program.

Beliau mengatakan: "Kami sudah mengajukan proposal tambahan ke dinas provinsi. Sampai sekarang, pembangunan breakwater belum dimulai. Sementara itu, masyarakat hanya bisa bertahan dengan karung-karung berisi tanah. Sudah banyak rumah yang berpindah tempat tinggal ke area lebih dalam."

Warga yang terdampak secara langsung juga menyampaikan keluhan. Ibu Fatimah, salah seorang warga yang rumahnya rusak berat akibat abrasi mengatakan: "Dulu rumah saya cuma 20 meter dari pantai. Sekarang garis air sudah sampai halaman. Kami pindah ke rumah saudara. Pemerintah katanya mau bangun pemecah ombak, tapi belum juga ada alat berat datang."

Observasi lapangan menunjukkan bahwa garis pantai di beberapa titik telah bergeser hingga 5–10 meter lebih ke daratan dibandingkan tahun 2023. Banyak geobag yang sebelumnya dipasang sebagai tanggul sementara kini dalam kondisi

rusak, tertutup pasir, atau tergerus gelombang. Tanggul darurat yang dibuat warga dari karung goni dan batu juga tidak mampu bertahan lama terhadap gelombang pasang yang bisa mencapai 3–4 meter.

Selain itu, pemuda desa yang sempat berinisiatif melakukan penanaman mangrove juga mengalami kegagalan. Salah satu tokoh pemuda setempat mengungkapkan: "Kami coba tanam mangrove secara swadaya. Tapi ombak besar bikin tanaman mati. Anak-anak muda sebenarnya mau bantu, tapi tidak ada pelatihan atau pendampingan dari pihak luar".

Sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat juga mengalami stagnasi. Hanya segelintir warung yang masih beroperasi di sepanjang pantai, sementara sebagian besar usaha kecil lainnya tutup karena turunnya jumlah pengunjung dan kerusakan lokasi wisata. Situasi ini mengindikasikan bahwa abrasi di Gampong Keudai Palak Kerambil tidak hanya merupakan bencana ekologis, tetapi juga krisis sosial-ekonomi yang kompleks (Nugroho et al., 2025).

Upaya pemerintah dan masyarakat memang masih berjalan, namun tanpa percepatan pembangunan infrastruktur permanen dan pendekatan kolaboratif lintas sektor, abrasi akan terus menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan wilayah pesisir tersebut.

1. Bentuk Abrasi dan Penyebab abrasi

Abrasi yang terjadi di Gampong Keudai Palak Kerambil disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia seperti Musim Barat yang membawa hujan dan gelombang laut yang lebih besar.

Sedangkan pada Musim Timur, yang merupakan musim kemarau, gelombang laut lebih kecil dan tidak menimbulkan abrasi. Indonesia berada di daerah tropis dan melewati garis khatulistiwa, yang mengakibatkan terjadinya dua musim yang berbeda, yaitu Musim Barat dan Musim Timur.

Faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah kerusakan terumbu karang, yang terjadi akibat pembangunan tanggul yang tidak tepat oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat daya.

Terumbu karang di laut rusak oleh alat berat yang digunakan dalam proses pembangunan tanggul. Selain itu, pembangunan tanggul yang tidak sesuai serta lokasi nya menyebabkan air laut tertahan dan tidak dapat memasuki muara, yang mengakibatkan peningkatan volume air laut yang mengarah ke pemukiman warga.

Pembangunan tanggul tersebut juga mengalami kerusakan karena pemilihan batu yang tidak berkualitas atau rapuh, yang memperburuk kondisi struktur tanggul tersebut (Muhamad Dwi Septiawan, Ida Hayu Dwimawanti, 2023).

2. Tingkat Keparahannya Abrasi

Tingkat Keparahannya abrasi di Desa Keudai Palak Kerambil sudah mencapai tahap yang sangat parah, di mana gelombang laut tidak hanya mengikis garis pantai, tetapi juga naik hingga melewati atap rumah warga, menghancurkan belasan rumah serta puluhan pondok-pondok wisata yang ada di sekitar pesisir.

Pengikisan pantai yang semakin parah telah menyebabkan daratan semakin menyusut, hingga hampir memakan badan jalan, gelombang yang di perkirakan 3-4 meter sangat mengancam keselamatan warga dan hunian warga di gampong keudai palak kerambil.



Gambar 1. Dampak Abrasi

3. Tingkat Kerusakan Abrasi

Sejak akhir tahun 2016, kawasan pesisir Gampong Keudai palak kerambil sudah mulai mengalami abrasi, meskipun pada saat itu dampaknya masih tergolong ringan. Pengikisan hanya terjadi di bibir pantai, merusak permukaan pantai di sekitar area wisata, serta merobohkan puluhan pondok wisata milik pedagang.

Selain itu, gelombang laut juga menghanyutkan sampah ke bibir pantai, yang menjadi masalah tambahan bagi warga setempat dan para pelaku usaha lokal.

Namun, abrasi semakin parah sejak akhir tahun 2019 hingga 2023, mengakibatkan belasan rumah hilang terbawa gelombang dan merusak rumah-rumah lain di sekitar pantai. Infrastruktur desa juga terdampak, termasuk jalan yang mengalami kerusakan pada tahun 2023.

Selain itu, abrasi juga menghancurkan berbagai fasilitas penting di desa, seperti balai desa, kantor PAUD, serta menyebabkan sembilan rumah mengalami kerusakan parah.



Gambar 2. Kerusakan rumah warga sebelum dan sesudah abrasi Di Desa Palak Kerambil.

4. Dampak Abrasi

a. Dampak Lingkungan

Abrasi di Gampong Keudai Palak Kerambil telah menyebabkan penyusutan garis pantai secara signifikan. Gelombang laut yang terus menerjang pesisir Gampong Keudai palak kerambil telah mengikis daratan, membuat wilayah pantai semakin menyempit dari tahun ke tahun.

Dampak dari abrasi ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam pemukiman warga, infrastruktur desa, serta mata pencaharian masyarakat Gampong Keudai palak kerambil. Jika tidak segera ditangani, abrasi yang terus berlanjut berisiko menghilangkan lebih banyak daratan dan memperparah kerusakan di kawasan pesisir(Wicaksono et al., 2022).

b. Dampak Ekonomi

Warga dan pelaku usaha lokal di pesisir pantai Gampong Keudai palak kerambil mengalami kerugian ekonomi yang semakin besar akibat abrasi yang terus berlanjut. Gelombang yang mengikis daratan tidak hanya merusak rumah-rumah warga, tetapi juga menghancurkan kantin, warung, serta berbagai tempat usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat.

Selain itu, keindahan pantai yang sebelumnya menjadi daya tarik utama wisatawan kini mulai memudar akibat abrasi yang menyebabkan perubahan bentuk garis pantai, hilangnya area pasir, serta bertambahnya sampah yang terbawa gelombang dan tersebar di sepanjang bibir pantai.

Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Dengan rusaknya kawasan pantai dan menurunnya daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan semakin berkurang, sehingga usaha yang bergantung pada sektor pariwisata mengalami penurunan pendapatan secara drastis.

Banyak pelaku usaha kecil seperti pemilik warung makan dan minum mengalami kesulitan untuk bertahan karena berkurangnya pelanggan.



Gambar 3. Kantin Yang Mengalami Kerusakan Akibat Abrasi

5. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah desa dan Pemerintah Daerah

a. Upaya Pemerintah Desa

Pemerintah desa punya peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik di desa. Mereka bekerja langsung dengan masyarakat untuk memahami apa yang dibutuhkan dan mengusahakan solusi yang sesuai.

Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan abrasi melalui program Cepat Tanggap Darurat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan karung goni yang diisi dengan tanah untuk membentuk penghalang sementara guna meredam ombak agar tidak terlalu jauh memasuki pemukiman warga. Namun, karena keterbatasan anggaran desa, langkah-langkah yang dapat dilakukan masih terbatas, sehingga masyarakat hanya bisa berupaya semampu mereka.



Gambar 4. Masyarakat Mengisi Tanah Ke Dalam Goni Berguna Sebagai Penghalang Ombak

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur mengenai sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan yang ada di desa. Beberapa sumber tersebut meliputi pendapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah. Namun, meskipun ada berbagai sumber pembiayaan tersebut, keterbatasan dalam pengelolaannya seringkali membuat pemanfaatannya belum optimal.

Beberapa warga juga mencoba menanam pohon sebagai benteng alami untuk menahan abrasi. Sayangnya, usaha ini tidak membuahkan hasil karena air

laut terus mengikis akar pohon, menyebabkan tanaman tidak dapat bertahan dan akhirnya mati (Ransta L. Lekatompessy, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan abrasi memerlukan solusi yang lebih efektif serta dukungan lebih luas dari berbagai pihak agar dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

b. Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah telah mengambil langkah nyata dalam menangani dampak abrasi dengan menyalurkan ratusan geobag kepada masyarakat terdampak. Geobag ini digunakan sebagai penghalang untuk meredam ombak dan mencegah pengikisan pantai semakin parah, sehingga diharapkan dapat melindungi pemukiman warga yang berada di garis pantai.

Meskipun langkah ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan abrasi, setidaknya dapat mengurangi dampak langsung dari gelombang laut yang terus mengikis daratan.

Selain bantuan infrastruktur, pemerintah juga memberikan bantuan kemanusiaan berupa sandang, pangan, dan papan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat abrasi. Bantuan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama bagi mereka yang harus mengungsi atau tinggal di tempat sementara.



Gambar 5. Bantuan pangan korban abrasi Di Desa Palak Kerambil

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mencari solusi jangka panjang, seperti melakukan kajian terhadap upaya mitigasi yang lebih efektif, termasuk pembangunan tanggul permanen atau penanaman vegetasi pelindung di wilayah pesisir (Artayasa, 2022).

Meski demikian, permasalahan abrasi memerlukan perhatian lebih luas dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait sangat dibutuhkan agar penanganan abrasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan warga pesisir.

Pemerintah daerah telah memasukkan bencana abrasi di Desa Keudai Palak Kerambil ke dalam program nasional (PROGNAS) dan saat ini telah memasuki tahap pelelangan. Upaya penanganan abrasi sebenarnya sudah mulai dilakukan, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran, sehingga progresnya mengalami keterlambatan. Meski demikian, pemerintah menargetkan bahwa pembangunan breakwater akan terealisasi pada tahun 2025 mendatang sebagai solusi jangka panjang dalam menanggulangi abrasi yang semakin parah.

Salah satu alasan utama mengapa penanganan abrasi belum sepenuhnya terlaksana adalah minimnya anggaran yang tersedia. Pemerintah kabupaten belum mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan breakwater, sehingga proses realisasinya masih tertunda. Meskipun proyek ini telah dipastikan

akan dilaksanakan, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak pemerintah setempat mengenai kapan tepatnya pembangunan akan dimulai.

Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera memberikan kejelasan dan mempercepat proses pembangunan demi melindungi pemukiman, infrastruktur, serta mata pencaharian mereka dari ancaman abrasi yang terus berlanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa abrasi di Gampong Keudai Palak Kerambil merupakan permasalahan lingkungan serius yang berdampak luas terhadap aspek fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Abrasi telah menyebabkan penyusutan garis pantai, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan darurat seperti geobag, logistik, dan merencanakan pembangunan breakwater permanen. Pemerintah desa juga berinisiatif melalui program tanggap darurat. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan partisipasi melalui tindakan swadaya seperti pemasangan tanggul sederhana dan penanaman vegetasi. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terbatas akibat kendala anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya kesadaran lingkungan. Penanganan abrasi yang berkelanjutan memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artayasa, I. P., Rinjani, Elya Kartika., Nurhidayah., Panbriani, Septi dan Amalina, Umami Auliya. (2022). Mitigasi Bencana Abrasi Pantai Melalui Penanaman Mangrove di Desa Seriwe, Jerowaru Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. 5(1). 226-230
- Dimaya, N. S., & Wijayanti, P. (2025). Dampak Abrasi Terhadap Lingkungan Fisik, Sosial – Ekonomi di Pesisir Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Geadidaktika*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.20961/gea.v5i1.93371>
- Israil, Imran, H. Al, Haidir, Lisdawati, & Rahmat, A. (2023). Analisis Karakteristik Gelombang Dan Proses Abrasi Di Pesisir Pantai Popo Galesong Selatan. *Jurnal Teknik Hidro*, 16(2), 71–80.
- Marhamah, I., Mulia, F. A., Danhas, M., Deli, R., Silvia, S., Mardiyah, S., & Rahmat, H. K. (2025). Analisis Dan Mitigasi Risiko Bencana Gelombang Ekstrem

- Dan Abrasi Pantai Di Pantai Muaro Sasak Kabupaten Pasaman Barat (Disaster Risk Mitigation And Analysis Of Extreme Waves And Coastal Abrasion In Muaro Sasak Beach, West Pasaman Regency). *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*. 4(1), 11–22.
- Muhamad Dwi Septiawan, Ida Hayu Dwimawanti, T. Y. (2023). Mitigasi Bencana Abrasi di Kecamatan Tugu Oleh Pemerintah Kota Semarang. *Journal of Management & Public Policy*. 12 (2). 635-649.
- Muthmainnah, M., Latief, R., & Arief, R. (2022). Upaya Mitigasi Bencana Abrasi Pada Kawasan Pesisir Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(3), 208–218. <https://doi.org/10.35965/jups.v2i3.287>
- Noya, M., & Noya, E. V. (2023). Dampak Gelombang Kapal Cepat Pada Wilayah Pesisir Pantai Yang Mengakibatkan Abrasi. *Balobe Law Journal*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.47268/balobe.v3i1.1366>
- Nugroho, S. S., Safitri, K. I., Syamsuadi, A., & Syahrir, F. A. (2025). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau. *SUMUR: Social Humaniora*. 3(2). 43-55.
- Permatasari, I. N. (2021). Kajian Resiko, Dampak, Kerentanan dan Mitigasi Bencana Abrasi dibeberapa Pesisir Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research) (J-Tropimar)*, 3(1), 43–53.
- Ransta L. Lekatompessy, E. E. M. (2021). Faktor-faktor dalam upaya mengatasi abrasi di pesisir pantai di wilayah kabupaten merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3, 1–13.
- Sularso, Octavianus, & Suryono. (2021). Mitigasi risiko bencana banjir di Manado. *Jurnal Spasial*, 8(2), 267–274.
- Wicaksono, A. B., Ridlo, M. A., & Rahman, B. (2022). Analisis Perubahan Permukiman Akibat Dampak Abrasi & Inundasi (Studi Kasus : RW 02 & 08 Desa Sriwulan Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 1 (1). 130–145.